

474 Bacaleg Terdaftar di KPU Temanggung

TEMANGGUNG (KR) - Meski ada perbaikan persyaratan dokumen administrasi, jumlah bakal calon legislatif (bacaleg) di Kabupaten Temanggung masih 474 orang. Ketua KPU Kabupaten Temanggung Muhammad Yusuf Hasyim mengatakan ada beberapa partai politik (parpol) dari 16 parpol peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung mengurangi jumlah bacaleg pada perbaikan persyaratan dokumen administrasi.

"Jumlah bacaleg pada pendaftaran sampai 14 Maret 2023 sebanyak 560 orang, namun dalam perbaikan persyaratan dokumen administrasi tinggal 474 orang," kata Muhammad Yusuf Hasyim, Selasa (11/7). Dikatakan, pada pendaftaran pengajuan perbaikan tahapannya sampai 9 Juli pukul 23.59 WIB dan KPU Temanggung sudah memfasilitasi parpol peserta pemilu di Kabupaten Temanggung sebanyak 16 parpol dan sudah mendaftar perbaikan semua dan dinyatakan lengkap dan diterima.

"Kemudian dari berkas dan sistem informasi pencalonan (silon) yang kami teliti dari berkas yang diajukan itu ada beberapa perubahan terkait daftar caleg masing-masing parpol," katanya. Yusuf mengatakan tidak semua parpol berubah, tetapi ada beberapa parpol yang berkurang dari jumlah bacaleg yang diajukan tanggal 14 Maret 2023. Disampaikan ada beberapa partai politik yang turun jumlah bacaleg antara lain Partai Garuda dan Partai Gelora, dari daftar yang diajukan kemarin ada beberapa pengurangan.

Yusuf mengatakan tahapan selanjutnya adalah verifikasi perbaikan mulai 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023. Selanjutnya nanti pencermatan daftar calon sementara (DCS). "Setelah perbaikan ini tidak dimungkinkan untuk bertambah atau berkurang dari sekitar 474 bacaleg yang nanti ikut dalam kontestasi di Pemilu 2024. Tapi masih bisa untuk diganti," katanya. (Osy)-f

Ada Parpol Tidak Ajukan Perbaikan

MAGELANG (KR) - KPU Kota Magelang menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Magelang untuk pemilu tahun 2024. Pengajuan perbaikan dibuka sejak 26 Juni 2023 lalu hingga Minggu (9/7) malam sekitar pukul 23.59. Informasi yang diperoleh KR dari KPU Kota Magelang, Senin (10/7), hingga batas waktu pukul 23.59, ada 1 partai politik yang tidak mengajukan perbaikan.

Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron mengatakan hasil penerimaan pengajuan perbaikan tersebut hasilnya dari 17 partai politik yang mengajukan bakal calon, yang diverifikasi administrasi dan kemudian dilakukan saran perbaikan, hingga pukul 23.59 Minggu tengah malam lalu ada 16 partai politik yang mengajukan perbaikan. "Satu partai politik tidak mengajukan perbaikan," katanya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut Basmar, ada juga beberapa partai politik yang melakukan perpindahan daerah pemilihan (dapil) dari dapil yang berbeda. Ada juga yang melakukan penggantian bakal calon dalam tahapan pengajuan perbaikan ini. Selanjutnya KPU Kota Magelang melaksanakan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, yang dilaksanakan 10-31 Juli 2023. Kemudian penyusunan hasil akhir verifikasi 1-4 Agustus 2023, serta penyampaian hasil verifikasi kepada partai politik pada 4-6 Agustus 2023.

Ketua KPU Kabupaten Magelang Affudin secara terpisah kepada KR di ruang kerjanya antara lain mengatakan meskipun batas waktunya Minggu tengah malam pukul 23.59, namun pada pukul 23.30 kegiatan sudah diselesaikan. Di Kabupaten Magelang ada 18 partai politik, dan ada 1 partai politik yang tidak mengajukan perbaikan, sehingga hanya 17 partai politik yang mengajukan perbaikan. Dikatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi, koordinasi, mengundang dan kunjungan ke sekretariat.

Juga dikatakan ada beberapa yang mengajukan perpindahan dapil, juga melakukan penggantian bakal calon. Tahapan berikutnya, lanjut Affudin, pihaknya melakukan verifikasi administrasi perbaikan maupun tahapan-tahapan lainnya, termasuk tahapan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DCT) maupun lainnya. (Tha)-f

29 SMP Negeri-Swasta Belum Penuhi Daya Tampung

SUKOHARJO (KR) Sebanyak 29 dari total 50 SMP negeri dan swasta yang menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Tahun Pelajaran 2023/2024 belum mampu memenuhi daya tampung siswa baru yang disediakan. Total kuota yang tersedia ada 2.044 siswa. Pihak sekolah berusaha keras memenuhi kekurangan siswa baru dengan membuka pendaftaran offline atau manual.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo Heru Indarjo, Selasa (11/7) mengatakan, Disdikbud Sukoharjo sampai sekarang masih terus memantau perkembangan sekolah pasca penutupan PPDB online SMP Tahun Pelajaran 2023/2024. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum pembelajaran digelar 17 Juli 2023 mendatang.

Disdikbud Sukoharjo mencatat total ada 50 SMP negeri dan swasta yang menggelar PPDB online Tahun Pelajaran 2023/2024. Disdikbud Sukoharjo sendiri sudah melaksanakan PPDB online tahap 2 pada 3-5 Juli 2023. Sedangkan tahap 1 jalur lingkungan juga telah selesai terlaksana 26-27 Juni 2023. Hasilnya sebanyak 21 SMP negeri berhasil memenuhi kuota yang disediakan. Sedangkan sisanya 29 SMP negeri dan swasta lainnya belum mampu memenuhi daya tampung.

Total di 29 SMP negeri dan swasta tersebut masih kekurangan 2.044 siswa baru. Angka tersebut merupakan untuk memenuhi semua daya tampung yang disediakan di sekolah. Untuk memenuhi kuota membuat pihak sekolah memperpanjang pendaftaran offline atau manual setelah sistem online resmi ditutup.

Rinciannya, SMPN 2 Bendosari kuota 96 siswa, hasil seleksi 39 siswa, kekurangan 57 siswa, SMPN 3 Bendosari kuota 64 siswa, hasil seleksi 15 siswa, kekurangan 49 siswa, SMPN 1 Bulu kuota 256 siswa, hasil seleksi 206 siswa, kekurangan 50 siswa, SMPN 2 Bulu kuota 120 siswa, hasil seleksi 99 siswa, kekurangan 21 siswa, SMPN 2 Grogol kuota 320 siswa, hasil seleksi 297 siswa, kekurangan 23 siswa, SMPN 1 Nguter kuota 224 siswa, hasil seleksi 176 siswa, kekurangan 48 siswa, SMPN 2 Nguter kuota 160 siswa, hasil seleksi 102 siswa, kekurangan 58 siswa, SMPN 3 Nguter kuota 146 siswa, hasil seleksi 53 siswa, kekurangan 93 siswa, SMPN 4 Nguter kuota 64 siswa, hasil seleksi 9 siswa, kekurangan 55 siswa, SMPN 2 Polokarto kuota 160 siswa, hasil seleksi 121 siswa, kekurangan 39 siswa. (Mam)-f

Aparatur Pemerintah Desa Jangan Korupsi

REMBANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta aparatur desa, baik perangkat desa maupun kepala desa di Rembang, agar menjaga kepercayaan masyarakat guna menyukseskan pembangunan desa. Penggunaan dana harus dikelola secara baik dan berintegritas.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan arahan kepada aparat pemerintah desa se-Kabupaten Rembang di Taman Sarinah, Desa Karang Sari, Kecamatan Sulang, Rembang, Senin (10/7).

Menurut Gubernur, dalam tata kelola negara ada tiga hal penting, yaitu aparat pemerintah, pangan yang cukup, dan kepercayaan. Satu yang tidak boleh hilang dari tiga hal itu adalah kepercayaan. Sesuai data yang ada di Pemprov Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelontorkan bantuan dana ke desa sebesar Rp 1,7 triliun. Untuk itu, aparat desa harus mengelola bantuan itu secara baik guna kepentingan rakyat.

"Jangan dikorupsi, jangan ada pungli. Lapornya juga sesuai dengan jadwal yang ada. Kalau nanti ada kesulitan kami siap mendampingi. Harapan kami, pembangunan di desa harus jauh lebih cepat," tutur Ganjar Pranowo. Diingat, aparat desa supaya mengejar penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayahnya. Dua hal itu telah menjadi prioritas baik di tingkat nasional maupun daerah. Apalagi Bupati Rembang juga sudah menyampaikan hal itu agar perangkat desa dan kadesnya kompak untuk membereskan persoalan ini. Datanya sudah ada, treatment sudah dilakukan, tinggal progres saja.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar desa terus berinovasi karena sudah banyak contoh inovasi desa yang menginspirasi dan menjadi contoh, seperti desa antikorupsi, desa bebas stunting, desa mandiri energi, desa lingkungan bersih dengan pengelolaan sampah, atau desa peduli perempuan dan peduli disabilitas.

"Itu dibentuk mereka dari inisiatif yang hebat, dan itu menjadi best practices yang ada dan bisa dibagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan, kawan-kawan PPDI nanti dengan Kadesnya akan bisa mengumpulkan cerita-cerita baik ini, kita bukukan, kita sebarkan dan mereka saling berkunjung untuk saling belajar," tegas Ganjar.

Bupati Rembang Abdul

Hafidz mengatakan, Rembang telah dijadikan pilot project penurunan angka kemiskinan ekstrem. Setidaknya ada 61 desa yang dijadikan percontohan penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan indikator kemiskinan yang ada.

"Untuk kemiskinan ekstrem ini pendataan sudah 100 persen. Dari jumlah itu masih ada indikator yang perlu dipertajam yaitu RT-

LH. Data kami pada tahun 2016 ada 23.000, sekarang tinggal 6.000. Kalau ini kita bisa ambil 50 persennya kemiskinan ekstrem, maka akan segera tuntas penanganan kemiskinan ekstrim di Rembang. Sedangkan untuk stunting di Rembang masih 13 persen. Kami akan terus berusaha menurunkan sampai di bawah 10 persen," tutur Bupati.

(Bdi/Ags)-f



Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada para kepala desa dan aparat desa.

Kepala Sekolah Harus Memiliki Inovasi

MAGELANG (KR) - Kepala Sekolah di wilayah Kota Magelang diminta ikut andil dalam membangun karakter siswa lewat inovasi-inovasi.

Kepala Sekolah juga diminta untuk tidak membebani orangtua atau wali murid dengan berbagai pungutan. Hal itu ditegaskan Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH saat bertemu dengan kepala sekolah tingkat SD dan SMP se Kota Magelang di Pendapa Pengabdian rumah dinas Walikota Magelang, Senin (10/7).

"Pada pertemuan ini kami tekankan pada pembentukan karakter pendidikan khususnya di Kota Magelang, sehingga menghasilkan karakter yang baik," kata Walikota Magelang. Kepala Sekolah harus memiliki inovasi, tidak monoton, melakukan per-

ubahan dan jangan sampai membebani orangtua atau wali murid mengingat tidak semua ekonomi orangtua sama.

Karakter anak yang baik, lanjutnya, diantaranya karakter yang mempunyai keberanian, kalau salah mengakui salah dan tidak memiliki sifat pendendam. Anak-anak perlu diajak berinovasi, kreatif dan belajar berkompetisi secara sehat karena tantangan ke depan lebih kompleks. Dikatakan sejauh ini Kota Magelang terkenal dan terbukti memiliki mutu pendidikan yang bagus, bahkan bisa bersaing dengan daerah lain. Hal itu harus diperta-

hankan.

Ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama lintas sektor. Contohnya, masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ternyata ada 55 anak di Kota Magelang. Menurut laporan, dari 55 ATS tersebut ada yang putus sekolah karena hamil di luar nikah dan ini akan dikaji.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang Imam Baihaji diantaranya mengatakan pertemuan ini merupakan wadah komunikasi antara Walikota Magelang dan Kepala Sekolah. Hal-hal yang dikomunikasikan diantaranya berkaitan dengan pengaruh handphone (HP) terhadap karakter anak. Dikatakan, saat ini HP mempengaruhi karakter anak.

Kemudian bagaimana pengaruhnya kalau pakai HP atau tidak pakai HP saat pembelajaran dan sebagainya.

Berkaitan dengan ATS yang ada di Kota Magelang, dikatakan perlu penanganan lintas sektor atau OPD, tergantung penyebabnya. Jika karena motivasi, maka ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB). Jika dikarenakan masalah ekonomi maka ditangani Dinas Sosial (Dinsos). "Kita ada tim penanganan ATS. Persoalan ini memang sebaiknya diselesaikan bersama, tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi juga Dispora, Dinsos, DP4KB dan lainnya," tambahnya. (Tha)-f

SPBU Bantu Pembuatan Barcode BBM Bersubsidi

BOYOLALI (KR) - Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kini mulai menggunakan QR Code pada aplikasi MyPertamina bagi kendaraan roda 4. Pertamina memberlakukan Skema Full QR dalam pembelian BBM bersubsidi. Ini dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan penyuluran Solar Subsidi yang lebih tepat sasaran.

QR code atau barcode memiliki beberapa manfaat bagi pengguna Solar Subsidi, terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli oleh penggunaannya, dan sebagai evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab. Saat ditemui di lokasi di SPBU 4457309 Kenteng Boyolali pengelola Bayu Aldi menjelaskan masih banyak konsumen yang belum memiliki Barcode untuk itu pihaknya akan membantu membuat QR Code. Mengingat SPBU Kenteng sering digu-

nakan sebagai lokasi pengisian BBM jenis Solar untuk keperluan transportasi kendaraan besar. Konsumen yang belum mempunyai barcode tidak boleh membeli BBM jenis solar bersubsidi.

"Namun, kendaraan yang mempunyai barcode pembeli BBM Solar bersubsidi dapat dibantu dibuatkan oleh petugas di SPBU. Sehingga, hal itu dapat memudahkan konsumen dalam pembelian BBM solar," ujar Bayu Aldi saat ditemui wartawan, Senin (10/7). Sementara bagi konsumen yang tidak memiliki hp pihaknya akan membantu memaknai hp petugas. "Petugas kami akan membantu pembuatan Barcode, setelah mempunyai barcode selanjutnya di scan diberikan kepada konsumen," kata Bayu.

Bayu menambahkan, kebutuhan BBM solar subsidi di SPBU Kenteng Boyolali rata-rata bisa mencapai 12.000 liter

hingga 17.000 liter per hari. Konsumen dengan kendaraan kecil rata-rata membeli BBM solar maksimal hingga 60 liter dan kendaraan besar sekitar 200 liter per hari.

Sementara, Operator SPBU 4457309 Kenteng, Dewi Ardiyanti mengatakan selama sistem pembelian BBM solar subsidi diberlakukan ada sejumlah konsumen yang belum memiliki barcode.

Jika konsumen pembeli solar subsidi belum memiliki barcode, mala akan di alihkan terlebih dulu untuk membeli BBM Dextlite non-subsidi yang harganya lebih mahal.

"Kami operator akan membantu konsumen

yang belum mempunyai barcode untuk membuat terlebih dahulu kemudian difoto. Jadi setiap pembelian BBM solar harus me-

miliki barcode. Barcode setelah difoto aplikasinya datanya akan masuk di alat ini," kata Dewi.

(Mul)-f



Pengelola SPBU Kenteng Boyolali, Bayu Aldi menunjukkan cara pembuatan QR code BBM bersubsidi.

KR-Mulyawan

Mimbar Legislatif

Pansus RTRW Kaji Berkurangnya Kawasan Hutan di Jateng

PANSUS DPRD Jawa Tengah yang saat ini masih membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, pekan lalu, untuk mengkaji berkurangnya kawasan hutan di Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja tersebut Pansus diterima oleh Kasubdit Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Dirjen Planologi Yana Juhana beserta tim.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus RTRW Jawa Tengah Muhammad Saleh. Dalam pertemuan itu, Saleh mengungkapkan perihal kondisi kehutanan di Jawa Tengah yang mengalami penyusutan. Dari data yang diterima Pansus menyebutkan, luas wilayah hutan di Jawa Tengah hanya 18 persen dari yang seharusnya seluas 30 persen dari luas wilayah Jawa Tengah. Upaya Pansus Raperda RTRW Jawa Tengah mendapat kemeterian lingkungan hidup dan kehutanan untuk memastikan pengembangan tata ruang untuk pembangunan ke depan sesuai dengan rencana pengembangan kehutanan.

Yana Juhana mengatakan, berdasarkan Permen ATR/BPN No 11/2021 Pasal 13 menyebutkan dalam penyusunan Perda RTRW terlebih dulu harus menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS untuk RTRW provinsi mencakup perencanaan wilayah darat dan perairan pesisir. Pansus Raperda RTRW Jawa Tengah dalam diskusi tersebut juga membeberkan kondisi hutan di Jawa Tengah saat ini yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk budi daya sebagai sumber ekonomi.

Mengingat pengelolaan hutan bukan bagian dari pemda, sehingga fasilitasi sarana prasarana untuk masyarakat tidak bisa dilaksanakan. Merespons hal tersebut, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyarankan agar Pansus RTRW melakukan komunikasi dengan Balai Jaringan di Jateng-DIY perihal reformasi agraria. (*)-f

(Disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus RTRW DPRD Jateng Muhammad Saleh kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)